

KONSELING LINTAS BUDAYA PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID

Ubaidillah Achmad

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Indonesia
ubaidillahachmada@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji model konseling lintas budaya KH Abdurrahman Wahid, (Gus Dur). Alasan meneliti pandangan Gus Dur, karena Gus Dur mampu menerapkan model konseling lintas budaya secara baik. Selain itu, Gus Dur mampu menjadikan teks kewahyuan relevan dengan model pendampingan keberagamaan. Tulisan ini memaparkan model konseling lintas budaya Gus Dur yang dapat dijadikan rujukan konseling Islam dan konseling lintas budaya. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi perkembangan studi konseling kegamaan di tanah air.

Kata Kunci: Prinsip Islam, Agama, Subjek Dampungan, Konseling Lintas Budaya

Abstract

CROSS-CULTURAL COUNSELLING PERSPECTIVE OF ABDURRAHMAN WAHID. In this research, researchers will examine the model of cross-cultural counselling KH Abdurrahman Wahid, then called Gus Dur. Examine the reasons Gus Dur, because he was able to apply the model of cross-cultural counselling. In addition, Gus Dur is able to make the text apocryphal works relevant to the mentoring model of religiosity. This article will describe the

model of cross-cultural counselling Gus Dur which can be used as a reference source of Islamic counselling and counselling cross-cultural. This can be a valuable contribution to the development of counselling studies in some Islamic universities.

Keywords: *Islamic principles, religion, the subject of the beneficiaries, cross-cultural Counseling*

A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi. Fenomena perkembangan ini bersimetris dengan kehendak dan pilihan manusia pada hal-hal yang bersifat kesenangan sesaat, yang berimplikasi pada meningkatnya problem mental masyarakat modern (Capra:1997). Hossen Nasr menemukan fenomena ini sebagai sumber kemunculan krisis manusia modern (*The Plight of Modern Man*). Realitas perkembangan mental masyarakat modern ini, telah menguatkan perkembangan bidang ilmu psikologi modern dan bidang ilmu konseling (Corey: 2004). Sehubungan dengan perkembangan kedua bidang keilmuan ini hingga kini masih menghadapi nestapa manusia modern. Selain itu, ternyata tidak mudah menjawab problem mental manusia meskipun dengan cara intens kepada subjek dampingan yang sedang menghadapi persoalan hidup.

Sebagai upaya untuk menjawab problem pendampingan kepada subjek bermasalah, kiranya tepat dengan mengajukan model konseling lintas budaya Gus Dur. Alasan peneliti mengajukan model konseling lintas budaya Gus Dur, karena banyak tema konseling dan model pendampingan lintas budaya dari Gus Dur yang berhasil menjawab problem lintas budaya yang terkait dengan subjek dampingan. Sehubungan dengan konseling lintas budaya Gus Dur, penulis akan memfokuskan pada dua persoalan berikut: Apakah pendampingan Gus Dur kepada subjek dampingan relevan dengan konseling lintas budaya? Bagaimana model konseling lintas budaya KH. Abdurrahman Wahid? Dari pertanyaan ini, penulis berharap

dapat menjawab persoalan yang melatarbelakangi tema penulisan dan dapat memberikan kontribusi pengembangan konseling religi pada studi ilmu keislaman di lingkungan perguruan tinggi.

B. Pembahasan

1. Model Konseling Lintas Budaya

Kerangka teoritik konseling lintas budaya tidak dapat dipisahkan dengan historisitas keberadaan manusia (Jumarlin:2002). Konseling lintas budaya terkait dengan kultur yang membentuk kekhasan individu (Matsumoto: 2008). Karenanya, model konseling lintas budaya memerlukan kompetensi konselor untuk memahami individu, baik yang terkait dengan sosial politik maupun sosial budaya individu (Aderson: 1991). Konseling lintas budaya tidak hanya memerlukan intensitas keterlibatan konselor dengan konseli, namun juga memerlukan kemampuan konselor memahami hal berikut: *physical sensation dan psychological states* konseli, menghormati sikap konseli, nilai agama, nilai budaya konseli, sikap fleksibel, sikap positif, dan kepuasan psikis subjek (Griffin 1976: 17), kemampuan menghadirkan eksistensi diri dan ekspresi diri.

Konseling lintas budaya di atas, berbeda dengan konsep dualistik-supernaturalistik dan materialistik. Konsep dualistik memandang manusia terbatas pada rasio dan fisik yang cenderung materialistik. Sedangkan, konseling lintas budaya memahami manusia melampaui batasan dualistik-supernaturalistik dan materialistik. Karena banyak problem yang dihadapkan pada konseling lintas budaya, maka tidak cocok hanya dengan menggunakan konsep dualistik-supernaturalistik dan materialistik. Hal ini terlihat dari beberapa kajian konseling lintas budaya yang merujuk pada data-data yang di luar perspektif dualistik, namun terus memperhatikan nilai pembentuk (Vontress: 2002). Nilai pembentuk subjek

dampingan merupakan bagian dari alat budaya (Carter:1991) yang tidak dapat dipahami hanya dari aspek dualistik.

Nilai pembentuk dapat menjadi instrumen untuk memahami dan mempotensikan kondisi psikis manusia. Selain nilai pembentuk menjadi bagian dari *faktor budaya*, nilai pembentuk juga akan menguatkan hakikat manusia, orientasi waktu, relasi manusia dengan alam, dan adanya orientasi tindakan. Menurut Locke faktor budaya memiliki keterkaitan dengan faktor: bahasa, *stereotype*, kelas sosial, suku, dan jenis kelamin. Karenanya, dalam konseling lintas budaya memerlukan: pengetahuan spesifik tentang kelompok, pemahaman terhadap sistem sosio-politik konseli, pengetahuan tentang karakteristik verbal dan non-verbal, memberikan intervensi demi kepentingan konseli (Holaday:1994). Kesemua ini memerlukan kehendak individu (Cowburn: 2008). Kehendak (Pink: 2004) merupakan fitrah manusia yang sudah menjadi tema kajian tertua di dunia dari data yang diwariskan sejak Yunani, sebagaimana yang diwariskan oleh Homer dan Sophocles; Plato dan Aristoteles (Frede,2011:1).

Kehendak manusia dapat menjadi kunci jawaban yang dapat digunakan untuk menjawab banyak persoalan yang dirasakan konseli. Pandangan para Filosof Yunani Kuno tentang kehendak manusia berkembang hingga abad pertengahan, yaitu pada masa *Stoisisme dan Epikureanisme; Agustinus, Anselmus dan Thomas Aquinas; Leibniz, Descartes, Hume dan Kant; Schopenhauer dan Freud; Nietzsche, Kierkegaard, Sartre dan Camus; William James, Wittgenstein, Whitehead, Sam Harris*. Mereka ini memahami kehendak sesuai dengan sudut pandang yang berbeda beda. Misalnya, dari sisi kecenderungan moralitas, kosmologi, politik, ekonomi, agama, psikologi, sains, hukum dan kriminologi.

Secara kontekstual, para konselor pun bisa memberikan model pendampingan kepada subjek dampingan yang disesuaikan dengan visi dan misi kehendak konseli. Sehubungan dengan kehendak, manusia dapat membaca kegelisahannya dan memberikan jawaban yang relevan dengan persoalan

kehendak manusia. Kehendak manusia dapat dipahami dari keberagaman, moral, psikologis, neurologi yang berhubungan dengan neuron-neuron pada otak manusia. Jadi, kehendak merupakan tema tertinggi, karena kehendak merupakan ciri utama: sifat kemanusiaan (Hans Kung); kematangan identitas (Erik Erikson); kesadaran moral secara universal (Kohlberg); keutuhan kepribadian (Sugiharto, 2000:262), kebudayaan dan keragamannya. Sebagai contoh tentang kebudayaan, budaya dapat dipahami sebagai hasil refleksi kehendak akal budi, kehendak kesenian, kehendak kepercayaan dan kehendak adat istiadat (KBBI, 1998:149).

Koetjaraningrat (1997:94) menjelaskan relasi kehendak dengan budaya sebagai model keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang diperoleh dari belajar kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan pengertian budaya ini, manusia bersifat saling mempengaruhi melalui model perilaku dan kehendak yang ditampilkan. Relasi manusia dengan kebudayaan dikaji melalui ilmu antropologi. Sedangkan, secara psikologis mengkaji perilaku subjek dengan yang lain (Kneller, 1978). Dalam pandangan Locke dalam Brown (1988), unsur pokok dalam konseling lintas budaya, berupa: individu, nilai budaya, faktor ras, etnis. Unsur pokok ini dapat menjadi instrumen untuk mendapatkan pemahaman yang terkait dengan sifat individualistik (Atkinson:1998 dan Morgan: 1997), psikodinamik, eksistensial-humanistik, kognitif-perilaku, multikultural (Corey dan Ivey, 2001:1997).

Konseling budaya (Elly:2007), bertujuan untuk membangun manusia yang seutuhnya dengan keseluruhan relasi yang membentuknya, seperti relasi ketuhanan, kesemestaan dan lingkungan sosial. Konseling budaya ingin mengembalikan manusia dengan nilai budaya, karya, dan usaha pengembangan budaya dengan ilmu pengetahuan. Karenanya, lembaga pendidikan sangat memerlukan konseling lintas budaya (UU No. 02 1989,P.1., Schemuller:1976, Musnamar: 1986,Tijan:1993). Keutamaan konseling lintas budaya (*counseling a cross culture*)

relevansinya dengan pendidikan, karena setiap peserta didik akan menjadi bagian dari upaya pengembangan transformasi budaya. Konseling lintas budaya dapat dikembangkan menjadi: pendampingan kepada konseli yang sedang menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan masyarakat hidup dalam keragaman budaya dan dapat menjadi masyarakat yang berperadaban.

Keragaman budaya meliputi tiga sistem (Kuncaraningrat: 1985) berikut: budaya yang memiliki unsur nilai, sosial, dan kebudayaan fisik. Karenanya, jika model pendampingan tidak mempertimbangkan budaya konseli (*indigeneous values*), maka akan mempersulit kerja konselor memberikan pendampingan. Hal ini sesuai dengan fungsi konselor: memberdayakan nilai budaya individu dengan keahlian, kepercayaan, daya tarik, kesamaan kekhasan personal, menjaga keseimbangan emosi, situasional, ganjaran, menyenangkan pihak lain, kedekatan, kemampuan, pengaruh, kualitas personal, memiliki kepercayaan, berkualitas, menghayati kemanusiaan, memiliki kepekaan, keterbukaan, memahami diri sendiri, menghayati profesionalitas (Prayitno, 1994). Konseling lintas budaya menekankan prinsip kebenaran universal dan kekhasan budaya (emik). Dalam emik, seorang konselor menguji dan membandingkan sendiri antara kebudayaan dan struktur kebudayaan yang berbeda beda (Markus dan Kitayama, 1991).

Sehubungan dengan sistem emik ini, meniscayakan peran konselor untuk menjadikan dirinya bagian dari kebudayaan konseli, sehingga akan memudahkan konselor untuk menjadikan konseli berkemampuan: mempotensikan diri, mengekspresikan kekhasannya secara independen dan interdependensi (Kiyatama:1994), membentuk keseimbangan emosi social (*socially engaged emotion*).

2. Gus Dur Dan Konseling Lintas Budaya

Dalam sub pembahasan ini, penulis menjawab persoalan: apakah pendampingan Gus Dur kepada subjek dampingan

relevan dengan system konseling lintas budaya? Dalam menjawab pertanyaan ini, penulis mengacu pada konsep model konseling lintas budaya. Jika mengacu pada model konseling lintas budaya, maka Gus Dur dapat dikategorikan sebagai sosok pendamping konseling lintas budaya (Menanti:2005) dan memahami unsur keseimbangan psikis manusia: *ruh, qalb, aql, dan nafs*. Unsur psikis manusia ini, telah lama menjadi bahan kajiannya selama menekuni kitab kuning di pesantren. Kerangka teoritik bangunan keseimbangan psikis manusia yang terdiri dari empat unsur ini merupakan instrumen untuk mengukur kesehatan mental. Sehubungan dengan instrumen empat unsur psikis yang digunakan untuk mengukur kebahagiaan yang dikaitkan dengan latar belakang sosial budaya individu inilah yang menguatkan keberadaan Gus Dur sebagai konselor bidang konseling lintas budaya.

Sehubungan dengan terbentuknya keseimbangan empat unsur psikis ini, telah pembentuk sikap dan perilaku Gus Dur yang didasarkan pada bangunan relasi suci kosmologis (Allah, Manusia, dan Alam). Empat unsur psikis yang sedang berintegrasi dengan prinsip kosmologis Gus Dur inilah yang menguatkannya berhadapan dengan konflik agama dan kekerasan tersistem atau kekerasan komunal. Karenanya, jika relasi suci kosmologis ini tidak terjaga dengan baik dalam prinsip hidup dan kepribadian manusia, maka secara otomatis akan meruntuhkan empat unsur psikis manusia. Secara spesifik, sebagai contoh membangun relasi suci kosmologis dengan Allah, manusia dapat menekankan sikap dan perilakunya untuk condong lurus kepada Allah (*taslim*), pasrah secara total kepada Allah (*tafwidl*), dan tunduk kepada Allah (*al inqiyadl*). Arti etimologi ini juga harus dikaitkan dengan upaya menjaga keseimbangan relasi manusia dengan unsur kesemestaan. Artinya, manusia berkewajiban untuk menjaga fungsi keseimbangan unsur kesemestaan. Jika manusia tidak menjaga keseimbangan kesemestaan, maka akan membuat kerapuhan empat unsur psikis pada diri manusia. Jika empat unsur keseimbangan psikis manusia

rapuh, maka akan membuat mental manusia lemah di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip ini telah membentuk kekhasan Gus Dur di tengah upaya penguatan gerakan kerakyatan.

Relasi suci kosmologis merupakan pondasi nilai keseimbangan unsur psikis manusia, pondasi nilai kebudayaan dan pondasi keberagaman masyarakat di lingkungan pesantren berbasis Nahdlatul Ulama. Pondasi nilai ini mampu membentuk model konseling lintas budaya Gus Dur di tengah kehidupan sosial bersama individu dan masyarakat. Model aktualisasi nilai relasi suci kosmologis berintegrasi dengan keseimbangan unsur psikis di tengah kehidupan individu dan masyarakat sering disebut dengan istilah pribumisasi Islam. Jadi, sama dengan konteks pribumisasi Islam, kontekstualisasi konseling lintas budaya Gus Dur juga dalam rangka untuk mengaktualisasikan prinsip nilai relasinya dengan keberagaman dan kebudayaan individu. Yang membedakan konseling lintas budaya Gus Dur dengan misi komunal model dakwah kiai, adalah pemikiran dan sikap Gus Dur mengaktualkan prinsip nilai untuk penguatan kemanusiaan dan peradaban secara universal.

Sedangkan, misi komunal model dakwah kiai terbatas pada ruang lingkup masyarakat tradisi nahdliyyin dan masyarakat lokal. Konseli yang mengadukan permasalahan kepada Kiai pun berbeda dengan konseli yang mengadukan permasalahan kepada Gus Dur. Konseli yang mengadukan permasalahan ke para Kiai, adalah mereka yang masih dalam koridor masyarakat Nahdliyyin dan masyarakat lokal. Sedangkan, konseli yang mengadukan ke Gus Dur, adalah mereka yang dari lintas masyarakat nahdliyyin, masyarakat lokal, masyarakat lintas agama, dan masyarakat lintas budaya. Sehubungan dengan model konseling Gus Dur di atas merupakan model konseling lintas budaya yang bersumber dari empirismenya sebagai pendamping masyarakat melalui pendekatan agama kenabian (Griffin:1976).

Dalam perspektif Gus Dur (Goode:1991), model konseling lintas budaya bersamaan dengan gerakan pembebasan dan

pencerahan di tengah konflik agama merupakan prinsip agama kenabian. Dalam konteks ini, Gus Dur berupaya memahami hal-hal penting dari prinsip agama untuk pembebasan dan pencerahan. Kerangka acuannya, adalah terletak pada komitmen menjaga nilai keislaman dan relasi kosmologis di tengah kebudayaan dan keberagaman masyarakat (Suseno1993). Gus Dur memahami bentuk manifestasi budaya, ajaran, dan ideologi dunia. Kerangka dasar pemahaman ini yang menguatkan peran Gus Dur menyampaikan prinsip fitrah yang merupakan bentuk potensi kesadaran manusia relasinya dengan Allah, kesemestaan, dan lingkungan sosial. Gus Dur menjadikan prinsip Islam dan relasi suci kosmologis sebagai rumah kembali yang terbuka untuk persoalan individu dan masyarakat. Karenanya, umat Islam tidak boleh menjadikan Islam sebagai agama yang tertutup terhadap perkembangan agama dan budaya masyarakat dunia.

Umat Islam harus bersifat terbuka dan dealektis dengan model perkembangan pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, akan menyelesaikan persoalan individu dan masyarakat. Jika umat Islam bersikap tertutup dari ilmu pengetahuan dan persoalan individu serta masyarakat, maka berarti telah menutup Islam sebagai prinsip yang telah menjadi rumah kebenaran dan pencerahan umat manusia. Yang terpenting dalam membentuk sikap terbuka tetap mempertahankan prinsip kemanusiaan, keadilan, persamaan, dan relasi suci kosmologi. Islam sebagai agama pencerahan sebagaimana yang dilakukan Gus Dur, telah mampu menjawab persoalan umat manusia dalam konteks lintas kebudayaan. Misalnya, jawaban dan konseling Gus Dur yang didokumentasikan pada: *Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab: Sebuah Pergumulan Wacana dan Transformasi*. Jakarta: Fatma Press, 1989; Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman. Jakarta, Kompas, 2014.

Selain kedua karya ini, masih banyak karya Gus Dur yang lain yang ditulis setelah menerima subjek dampingan dan memberikan model pendampingan. Sikap keutamaan Gus Dur, berupa memberikan pendampingan kepada subjek dampingan

dan menjadi sebuah artikel yang terpublikasi ke beberapa media terkemuka. Jadi, tulisan Gus Dur bersumber dari pengalaman langsung selama memberikan pendampingan kepada subjek dampingan seputar persoalan pribadi, tradisi pesantren, persoalan bangsa, dan persoalan kebudayaan.

3. Model Konseling Abdurrahman Wahid

Kasus pertama: konflik agama dan kekerasan tersistem. Secara umum: adanya konflik agama dan kekerasan tersistem, telah memunculkan persoalan para pengikut agama minoritas di Indonesia. Misalnya, mengalami beban mental dan psikis, kegelisahan subjek dari sumber persoalan kerusakan dan ancaman teror sebelum era reformasi, dan bias gender yang dirasakan kaum perempuan di Indonesia

Sehubungan dengan konflik agama dan kekerasan tersistem ini, telah menguatkan peran dan keterlibatan pendampingan Gus Dur di tengah masyarakat. Banyak persoalan konseling lintas budaya yang bersumber dari konflik agama dan kekerasan tersistem. Misalnya, yang dialami para pengikut agama minoritas di Indonesia, kegelisahan subjek diakibatkan persoalan kerusakan dan teror sebelum era reformasi, dan bias gender (Davenport, 1991: 64-71) yang dirasakan beberapa kaum perempuan di negara Indonesia. Mereka yang menghadapi persoalan ini, banyak mengadukan ke Gus Dur, agar memberikan pencerahan dan terapi psikologis dan kesehatan mental. Dengan demikian, subjek dampingan menjadi bersikap tegar dan tidak mengalami beban psikis. Banyak liputan dan laporan penelitian yang sudah terbit yang mengungkapkan proses dampingan Gus Dur. Fenomena ini tercermin dari rumah Gus Dur yang terbuka lebar untuk konseling bagi individu dan masyarakat. Fenomena ini ditandai dengan konsep *Open House* Gus Dur. Jadi, *Open house* merupakan istilah yang muncul dari inisiatif Gus Dur menjawab problem konseling masyarakat. Inisiatif adanya program *Open House*, karena ilatorbelakangi konflik agama

dan kekerasan tersistem di Indonesia sejak kemunculan Orde Baru (Wahid: 2000).

Model dampingan Gus Dur menjawab persoalan individu dan masyarakat yang bersumber dari konflik agama dan kekerasan tersistem: *pertama*, Gus Dur memahami persoalan konseling individu dan masyarakat dari berbagai aspek. Artinya, persoalan individu tidak bisa hanya dilihat dari aspek struktur atau non-struktural. Masalah subjek dampingan sebagaimana yang disebutkan di atas, tidak secara otomatis menjadi masalah makro, namun juga masalah mikro. Yang lebih penting bagi Gus Dur, bagaimana menumbuhkan semangat dan harapan hidup membentuk sikap positif subjek dampingan. Dengan demikian, subjek dampingan tidak berlarut larut dalam sikap emosional, karena perjalanan pembebasan dan pencerahan masyarakat masih panjang. Dibalik sikap Gus Dur dihadapan subjek dampingan, ia tidak berpangku tangan membiarkan subjek dampingan, namun juga melakukan perjuangan untuk menegakkan kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Pendekatan Gus Dur ini terlepas dari jenis dan watak struktur itu sendiri.

Kedua, Gus Dur menjawab persoalan subjek dampingan yang menjadi korban konflik agama dan kekerasan tersistem dengan menguatkan visi makna agama kenabian di tengah peran sosial umat beragama. Misalnya, dengan menguatkan peran agama untuk memerangi meterialisme tanpa terpengaruh oleh struktur masyarakat. Agama dapat menjadi sumber nilai untuk menguatkan ideologi bangsa dan sumber daya manusia. Ideologi bangsa merupakan prinsip pendekatan struktural untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran. Agama sebagai sumber nilai bersmber dari prinsip yang diyakini Gus Dur, berbunyi: *Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafuur* (negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun).

Konflik agama dan kekerasan tersistem yang selalu menggunakan legetimasi agama merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap biasa, karena jika tidak diselesaikan akan berdampak pada beban psikis dan tekanan fasisime politis

kepada individu dan masyarakat di tengah relasi kuasa yang tidak seimbang (Hollingshead: 1972). Fenomena ini, juga akan melahirkan sikap anarkis masyarakat korban kekuasaan atau otoritarianisme kekuasaan. Konflik agama dan kekerasan tersistem ini yang mendorong Gus Dur untuk terlibat melakukan resolusi konflik antara agama dan kekuasaan. Jika dikaji dari perspektif konseling lintas budaya, adanya konflik agama dan kekerasan tersistem, karena adanya model tokoh agama yang justru mendukung fasisme politik yang tersistem. Sikap yang seperti ini akan melahirkan kegelisahan bagi individu dan masyarakat system kekuasaan atau kehendak kuasa. Oleh karena fenomena ini banyak melahirkan konflik keberagamaan yang mengatasnamakan jihad, melahirkan gerakan kekerasan, kekerasan sistem permodalan, manipulasi simbolisme agama untuk kehendak fasisme politik kekuasaan diri.

Konflik agama-agama dan kekerasan yang tersistem akan menciptakan pandangan dan sikap umat beragama secara intoleran. Karena kebanyakan para tokoh agama kenabian terseret pada arus kehendak kuasa, maka banyak tokoh agama yang terlibat dalam konflik agama dan kekerasan tersistem. Hal ini terbaca ketika para tokoh agama terlibat sebagai pelaku kepentingan kehendak kuasa, yang menjadikan agama sebagai instrumen kehendak untuk berkuasa. Misalnya, terorisme kasus Bali, Bom Thamrin, dan Bom Bunuh diri di Mapolresta Surakarta pada 5 Juli 2016. Oleh karena itu, jika model pendampingan tidak didasarkan pada kemampuan pemahaman terhadap konseling lintas budaya, maka akan melahirkan konflik baru pasca pendampingan. Hal ini bisa terjadi karena tokoh agama turut bermain dan terlibat dalam kepentingan kehendak kuasa ideologis dan komunalisme.

Dalam upaya untuk menghindari model pendampingan yang menambah permasalahan, Gus Dur selalu menggunakan beberapa cara: *pertama*, menahan penggunaan Istilah kafir dalam pembelajaran dan aktifitas keberagamaan. Alasannya, penggunaan kafir dapat menimbulkan dua sikap: *pertama*,

sikap yang membahayakan bagi subjek dampungan yang suka mengkafirkan dan subjek korban kekerasan verbal penggunaan istilah kafir. Kekerasan verbal gerakan *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) yang menelan banyak korban kemanusiaan. Yang kedua, mengajarkan arti penting melakukan pribumisasi Islam yang dikenalkan zaman kewalen. Konsep pribumisasi Islam ini sesuai dengan konteks tradisi kearifan lokal masyarakat Jawa yang bersimetris dengan prinsip nilai keislaman dan relasi kosmologis.

Kerangka dasar pemahaman Gus Dur dari konsep pribumisasi Islam ini menguatkan membuka sikap dan pandangan berdialog dengan agama-agama besar dunia yang dibawa oleh para nabi pembebas dan pencerah, dan juga berdialog dengan ideologi-ideologi besar dunia dari yang paling kanan hingga paling kiri. Kemunculan konsep pribumisasi Islam ini yang mendasari kematangan Gus Dur mempraktikkan model konseling lintas agama di tengah persoalan relasi kuasa agama dan kuasa sistem kekuasaan.

Kasus kedua: konflik formalisme agama dan kekerasan komunal. Secara umum: adanya konflik agama dan kekerasan komunal, mengakibatkan kegelisahan individu dan komunitas yang lain yang lemah dan yang tidak memiliki kekuatan komunal. Konflik ini berpengaruh pada sikap sebagian kecil warga NU dan warga Negara yang terlibat memperkuat formalism agama dan kekerasan komunal.

Fenomena adanya konflik formalisme agama dan kekerasan komunal telah berkembang pesat pada tahun 90-an. Fenomena ini mengalami puncaknya pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, 21 Mei 1998. Jika pada masa Orde Baru, individu dan masyarakat berhadapan dengan pemerintahan otoriter, maka era pemerintahan Orde Reformasi mengalami keterbukaan dan kebebasan dari berbagai kelompok keberagamaan dan gerakan komunalisme. Pada era reformasi ini muncul secara terang-terangan ideologi transnasional, yang di antaranya: HTI, FPI, PKS, DDI, dan Wahabi. Gerakan Islam formalis ini membentuk

komunalisme keberagamaan. Hal ini berdampak pada konflik yang bersumber dari formalism agama dan kekerasan komunal. Konflik ini membuat kegelisahan beberapa individu dan komunitas yang lain yang lemah dan tidak memiliki kekuatan komunal. Gerakan formalism agama dan kekerasan komunal ini mempengaruhi pandangan dan sikap beberapa warga NU dan masyarakat nasionalis. Bukti adanya pengaruh tersebut ditandai dengan pandangan dan sikap radikalisasi agama untuk bumi surga (Wahid: 1985) dan menguatnya gerakan kemunalisme di tengah perkembangan warga NU dan warga Negara.

Sehubungan dengan fenomena ini membuka paradigma konseling lintas budaya Gus Dur untuk membuka kesadaran dan sikap terbuka warga Negara terhadap perbedaan pandangan agama dan kebudayaan masyarakat. Model pendampingan Gus Dur tidak hanya di tengah keluarga besar warga NU, namun juga kepada kelompok nasionalis. Materi konseling lintas budaya Gus Dur kepada subjek dampingan dimaksud: *pertama*, mengarahkan kepada subjek dampingan untuk menentukan pilihan antara hal esensial agama dan hal yang dianggap bukan persoalan esensial agama. Materi konseling ini akhirnya membuka sikap subjek dampingan di tengah konflik formalism agama dan kekerasan komunal. *Kedua*, mengarahkan kepada anak muda NU untuk mendalami hukum agama dari buku *fiqh* kuno dan literatur studi perbandingan dengan hukum-hukum lain yang dianut di Barat. *Ketiga*, menekankan kepada konseli yang menghadap Gus Dur untuk menghindari sikap membanggakan diri dan kelompok. Sikap membanggakan kelompok dan milik ini mendapatkan kecaman dari teks kewahyuan dan risalah kenabian (*Kullu hizbin bima ladaihim farihun*). *Keempat*, mengarahkan subjek dampingan agar tidak menganggap rendah peradaban orang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip Gus Dur, bahwa Islam mengajarkan kepada umat untuk mencari keunggulan dari orang lain sebagai bagian dari pengembangannya. Sebagaimana teks hadis: carilah Ilmu hingga ke tanah Tiongkok (*Utlubu al-ilma walau*

fi al-shin). Kelima, tidak berkecil hati dan rendah diri terhadap kelebihan orang lain.

Model konseling lintas budaya Gus Dur yang kelima, sebagaimana diceritakan oleh Gus Dur, pernah ditegaskan pada Yomiuri Shinbun, harian berbahasa Jepang terbitan Tokyo dan terbesar di dunia dengan oplah 11 juta lembar tiap hari, untuk berdiskusi dengan Profesor Huntington, bersama-sama dengan Chan Heng Chee, dan Profesor Aoki dari Universitas Osaka. Dalam diskusi di Tokyo itu, Gus Dur menyatakan kenyataan yang terjadi justru bertentangan dengan teori perbenturan budaya yang dikemukakan Huntington. Sebaliknya ratusan ribu warga Muslimin dari seluruh dunia belajar ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri barat tiap tahunnya. Jadi, pada kedua bidang itu kaum Muslim tengah mengadopsi dari budaya barat. Cara penyelesaian konseling lintas budaya Gus Dur ini membuka keterbukaan sikap dan kebesaran jiwa anak muda NU menghadapi fenomena konflik formalism agama dan kekerasan komunal. Model konseling lintas budaya Gus Dur, justru membuat keberagaman anak muda NU lebih fleksibel dengan semua pandangan dunia. Selain itu, model konseling lintas budaya Gus Dur, juga membuat nyaman anak muda di luar tradisi NU. Model konseling Gus Dur ini menambah minat komunitas di luar pesantren dan NU yang menjadi komunitas Gus Durian setelah wafat Gus Dur.

Model konseling lintas budaya Gus Dur di tengah fenomena konflik formalism agama dan kekerasan komunal melahirkan anak anak NU yang cerdas dan menguasai ruang diskursus agama, kebudayaan, sosial politik, dan keilmuan. Gus Dur selalu menekankan kepada anak anak muda NU untuk tidak hanya mengarahkan pada kepastian kebenaran ideologis, kebenaran yang formal. Sehubungan dengan upaya untuk menghaluskan perasaan, manusia perlu mengambil hikmah dari kondisi ketidakpastian, kebimbangan, kegalauan, dan kesenduan. Gus Dur sering mencontoh novel berbahasa Prancis —yang diartikan *Gerbang yang Tertutup*— dikisahkan seorang

gadis bemama Allisa. Dia mencintai sepupunya. Kegalauan gadis Allisa terombang-ambing oleh rasa cinta, takut, dan bimbang, yang akhirnya justru menghaluskan perasaannya. Membawa diri kepada kesadaran di balik semua itu yang mengacaukan, membingungkan, dan menggalaukan, ternyata tampak yang abadi, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Karena itulah orang-orang yang mendapati kebesaran Allah bagi merekalah jalan untuk membuka gerbang yang tertutup itu menjadi sangat luas.

Pola fundamental dari konseling lintas budaya Gus Dur, adalah kemampuannya mengaktualkan prinsip nilai keislaman yang bersifat abstrak menjadi sesuatu prinsip yang konkrit. Gus Dur mampu mengeluarkan subjek dampingan keluar dari tekanan pemahaman formalism agama dan kekerasan komunalis. Hal ini bermula dari sikap ketegasan Gus Dur menguatkan kawasan kewahyuan yang relevan dengan teks kewahyuan. Prinsip dimaksud, disebutkan pada keislaman Gus Dur. Selain itu, yang menjadi kekhasan Gus Dur dalam menempatkan makna keislaman, adalah kemampuan Gus Dur menentukan sikap keberagamaan di antara model keberagamaan berikut: *pertama*, model keberagamaan yang secara konfrontatif terhadap perbedaan penafsiran. *Kedua*, sikap merayakan perbedaan terhadap penafsiran teks kewahyuan (Ubaidillah: 2016). Kemampuan Gus Dur meminimalisir konflik di tengah kompleksitas persoalan lintas budaya masyarakat, karena Gus Dur tidak mengambil posisi di antara dua perbedaan di maksud. Gus Dur meyakini, bahwa sumber kebenaran muthlaq hanyalah Allah. Sedangkan, manusia hanya memperkirakan kebenaran melalui apa yang dirasakan secara universal tentang keutamaan dan kebaikan, seperti prinsip ketuhanan dan kemanusiaan.

Hal-hal di luar nilai keutamaan dan kebaikan merupakan kerendahan dan keburukan. Adapun dibalik fenomena adanya kecenderungan sifat manusia hanyalah fenomena yang sebatas hanya bisa diperkirakan. Karenanya, setiap manusia yang terpenting berusaha untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia sesuai dengan sifat yang terpuji yang dekat dengan

kutamaan dan kemuliaan. Misalnya, menjaga relasi manusia dengan Allah, kemanusiaan, dan kesemestaan. Kondisi sifat keutamaan dan kemuliaan ini merupakan bentuk nilai dari kawasan kewahyuan yang ditandai oleh tanda pada tiap ayat al-Qur'an. Karenanya, Gus Dur selalu mengkritik kepada mereka yang mampu membaca teks kewahyuan dan menghafalkannya, namun tidak bergerak pada jalan kebenaran menegakkan kemanusiaan, keadilan dan persamaan.

Oleh karena itu, untuk dapat keluar dari jejaring atau jebakan formalism agama dan kekerasan komunal, maka konseling lintas budaya Gus Dur memberikan model keberagaman yang langsung memasuki kawasan tanda kewahyuan. Kawasan kewahyuan, adalah semua bentuk kawasan keutamaan dan kebaikan. Misalnya, prinsip kebenaran Islam dan relasi suci kosmologis. Kawasan kewahyuan berbeda dengan teks kewahyuan. Pemahaman yang tidak baik terhadap teks kewahyuan akan menjadi penghalang prinsip nilai yang berada pada kawasan kewahyuan. Berhenti pada teks kewahyuan tanpa memasuki kawasan kewahyuan, maka akan mengarah pada konflik formalism agama dan kekerasan komunal. Model penafsiran yang berhenti pada teks kewahyuan, maka akan mudah dibelokkan oleh para pembajak agama kenabian dan kewahyuan untuk kepentingan kekuasaan dan kapitalisme global.

Sistem pembajakan agama yang dilakukan oleh mereka yang mengedepankan kehendak kuasa agama dan fasisme politik, akan berpengaruh pada kondisi psikis individu umat beragama untuk saling turut memperebutkan kehendak kuasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini akan berdampak pada sikap eksklusif dan menganggap musuh bagi yang lain. Sehubungan dengan model menguatkan kawasan kewahyuan ini terinspirasi dari model pribumisasi Islam Walisongo (Wahid:1989). Walisongo memiliki kekhasan yang berbeda dengan Ulama tasawuf yang lain di Timur. Para Ulama tasawwuf di timur banyak menafsirkan kewalian dengan

pengertian yang sangat spekulatif yang sulit dimaknai oleh masyarakat awam.

Berbeda dengan Ulama spekulatif, Walisongo mengaktualkan makna kewalian tanpa mendefinisikan arti kewalian, namun menawarkan pada sikap berada pada kawasan kewahyuan dan melakukan pembebasan dan pencerahan kepada masyarakat (Ubaidillah: 2016). Walisongo menjadikan keberadaannya sebagai mediator yang menghubungkan antara raja ke rakyat dan rakyat ke raja. Selain itu, Walisongo juga mampu menguatkan kedua relasi antara raja dan rakyat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Implikasi adanya bangunan antara relasi raja-rakyat dengan Allah, adalah perlunya menerima prinsip kebenaran universal, karena setiap kebenaran universal bersumber dari Allah. Prinsip kebenaran universal ini, telah ditekankan dalam teks kewahyuan yang tidak akan berbeda dengan model kearifan lokal dan prinsip nilai kebenaran ideologi ideologi besar dunia. Kerangka dasar pemahaman ini yang menguatkan model konseling lintas budaya Gus Dur.

Kasus ketiga: konflik kepentingan masyarakat pesantren dan elit politik. Secara umum: adanya konflik kepentingan masyarakat pesantren dan elit politik, mengakibatkan beberapa ketidakmampuan subjek dampingan untuk menjawab persoalan psikis dan pergaulan. Konflik ini juga memunculkan beberapa sikap konseli yang memiliki kepentingan politik yang secara manusiawi ingin berkuasa sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Fenomena adanya konflik kepentingan di tengah masyarakat pesantren dan elit politik berakibat pada ketidakmampuan beberapa subjek dampingan untuk menjawab persoalan. Selain itu, juga memunculkan beberapa konseli yang memiliki kepentingan politik yang secara manusiawi ingin berkuasa sesuai prinsip kemanusiaan. Kedua tipologi konseli ini, sama sama menghadap memohon pendampingan Gus Dur, dengan tujuan untuk dapat memperoleh masukan dan strategi penguatan gerakan yang disesuaikan dengan jejak agama kenabian. Tipologi kepentingan pertama, sikap egosentris para Kiai

yang serba <kemewahan>: mengajar, beribadat ritual, sebagai konsultan masyarakat, memimpin beberapa jenis upacara keagamaan yang berdimensi sosial. Sikap ini membuat kiai sulit melakukan kesepakatan antar sesama Kiai. Adanya kesepakatan di antara Kiai didasarkan pada keputusan mereka yang menjadi guru di tengah kiai yang berkonflik. Sikap ini terjadi pada saat terjadi pembahasan hukum fiqh di tengah lingkungan masyarakat. Konflik kepentingan masyarakat pesantren banyak disebabkan adanya tarik menarik pengembangan hukum Islam (Wahid:1999) dan lembaga pendidikan pesantren: apakah tetap bertahan atau membentuk sistem modern?. Sedangkan, kerja Gus Dur memberikan pendampingan konseling lintas budaya kepada subjek berkepentingan dalam bidang politik terbaca terutama menjelang dilaksanakannya Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Pada pemilu ini dan sidang umum ini telah menimbulkan gejolak kepentingan politik. Pada saat ini banyak konflik politik yang menimbulkan kecemasan beberapa tokoh agama dan masyarakat tentang masa depan bangsa Indonesia (Wahid:1999).

Kasus tersebut di atas dipahami Gus Dur dengan sangat baik. Konflik kepentingan Kiai membuat Gus Dur bersikap memberikan pendampingan kepada masyarakat pesantren dan Kiai. Karena model konflik Kiai banyak pada persoalan kemampuan pemahaman terhadap teks dan konteks hukum Islam. Model pendampingan ini menghasilkan banyak kekhasan kiai di tengah masyarakat transisional dan modern. Selama Gus Dur memberikan dampingan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme kerja gerakan NU menekankan pada sikap Kiai untuk memiliki sikap kritisisme dan terbuka terhadap kajian hukum Islam di tengah laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian, adanya problem konflik yang terberat dalam tradisi pesantren, adalah pada persoalan fungsi mendidik masyarakat melalui dakwah oral Kiai. Dalam pendampingan ini, Gus Dur menekankan pada penguatan

nilai moral, penumbuhan toleransi dan pengembangan sikap perhitungan.

Sedangkan, dalam konteks konflik kepentingan elit politik, Gus Dur memberikan pendampingan dengan mengarahkan subjek dampingan yang terdiri dari elit politik untuk menengok salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting, yaitu unsur kehalusan budi dan rasa. Kalau kita hanya terlalu banyak memberikan perhatian kepada dimensi keyakinan dan kebenaran, maka kehidupan kita akan terasa kering. Kehidupan akan menjadi sangat ideologis, sangat formal, dan sangat sarat dilingkupi oleh aturan yang mengikat dan menjerat manusia. Berfikir rasional baik, namun dalam perspektif Gus Dur, sebaiknya seseorang tidak terlalu banyak memberikan tempat rasio, ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap memperhitungkan segala sesuatu *an sich*. Jika terlalu memberikan tempat rasio, maka dengan sendirinya manusia akan mengalami kekeringan batin dan kegalauan perasaan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada analisis para pakar terakhir ternyata tidak mampu memecahkan masalah yang ada dan menjadi tambahan masalah yang baru. Misalnya, Gus Dur mencontohkan pada penemuan plastik, semula menggembirakan, karena memberi fungsi yang efektif, ringan, dan murah, namun ujung-ujungnya mendatangkan malapetaka. Antara lain menyebabkan tersumbatnya saluran air dan menjadi penyebab banjir di kota-kota. Hal yang sama terjadi pada teknologi *kloning*, dari segi iptek merupakan penemuan luar biasa, tapi sekarang mendatangkan kecemasan jika diterapkan pada manusia. Maka jika kita hanya berbangga-bangga dengan iptek semata, kita akan kehilangan dimensi kehidupan yang paling berharga, yakni adanya pengertian dalam keseimbangan hidup yang didasarkan pada keseimbangan unsur psikis.

Kehendak manusia dapat menjadi instrumen untuk memahami dampak psikis yang dirasakan oleh individu. Karenanya, kemampuan seseorang dalam mengatur kehendaknya akan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

mengendalikan keseimbangan kepribadian berelasi dengan pihak lain. Dalam kajian filsafat dan agama, persoalan kehendak manusia merupakan persoalan yang tidak mudah dipahami, sebab ada banyak cabang tema tentang kehendak manusia. Hal ini dapat dipahami dari pendekatan yang berbeda beda. Sehubungan dengan kehendak manusia, pertama kali muncul dalam konteks pembahasan teks kewahyuan agama kenabian (Kane, 2005: 147). Sedangkan, secara filosofis, kajian kehendak mulai dibahas sejak abad pertengahan yang ditandai karya Agustinus yang berjudul, "*On The Free Choice* dan *On Grace and Free Choice*."

Selain karya Agustinus, persoalan kehendak dapat dibaca pada karya Anselmus, berjudul, "*On Free Will* dan *On the Fall of the Devil*." Selain Agustinus dan Anselmus, Thomas Aquinas membahas kehendak manusia relevansinya dengan sifat dan kebebasan manusia. Sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan kehendak berkembang dalam bentuk pandangan yang tidak hanya sebagai persoalan teologis, namun berpengaruh pada bidang kajian keilmuan. Misalnya, bidang psikologi, sosiologi, antropologi, dan kebudayaan. Dengan konteks konseling lintas budaya Gus Dur, memahami kehendak manusia tidak bisa hanya dilihat dari kemewahan sikap seorang Kiai dan kewajaran sikap manusiawi para pelaku politik, namun juga harus dilihat dari relasi kuasa yang tidak seimbang yang membentuk kehendak seseorang. Misalnya, kehendak yang muncul dari ketidakmampuan seseorang menghadapi kedzaliman sistem kekuasaan kapital.

Bersamaan dengan adanya kehendak tokoh masyarakat pesantren dan elit politik, Gus Dur menguatkan khazanah sufistik yang memahami manusia dari keseluruhan unsur pembentuk kehendaknya. Misalnya, ruh, hati, rasio, nafs, dan jasad. Dengan demikian, keberadaan kehendak tidak terpecah pada aspek dualism Descartes, Galileo, Newton saja dan melupakan aspek yang lain. Karena manusia tidak hanya bersifat dualistik sebagaimana yang diajukan oleh kaum modernis, namun juga

memiliki unsur yang menjadi sumber kebahagiaan jiwa, seperti ruh, hati, akal, dan nafs. Dengan memperhatikan rasio dan body dan melupakan aspek yang lain, maka subjek dampingan akan berada dalam kegelisahan kehendaknya sendiri.

Dalam konteks perspektif dualistik, manusia dipahami sebagai pemilik rasio yang bersifat bebas dan sebagai pemilik materi yang bergerak secara mekanistik-fisika. Model dualistik ini membentuk materialisme yang mengakui keterbatasan dan ketergantungan rasio secara mekanik pada hukum alam dan fisika. Karenanya, bagi materialism manusia mengutamakan materi atau kebutuhan jasad. Bagi pengikut materialism, materi atau jasad merupakan sumber kebahagiaan. Aliran materialism melahirkan sistem modernitas yang menguatkan kehendak bebas manusia di satu sisi, namun di sisi lain manusia dibuat tidak berdaya. Ketidakberdayaan kehendak manusia dalam cengkaman materialisme terlihat ketika harus memilih intuisi kebebasan dengan intuisi determinisme. Dalam cengkaman prinsip materialism, manusia sudah kesulitan menentukan kebebasan menentukan kehendaknya (*self-determination*) dengan berkhidmat pada hukum ilmu pengetahuan modern.

Sehubungan dengan adanya bahaya ancaman materialism, maka konseling lintas budaya Gus Dur menekankan pada penguatan nilai, toleransi dan pengembangan sikap perhitungan. Selain itu, Gus Dur mengarahkan kepada subjek dampingan untuk menengok dimensi kehidupan yang penting, yaitu unsur kehalusan budi dan rasa.

Kasus keempat: konflik keterasingan individu. Secara umum, berada dalam keterasingan membuat individu tidak nyaman melaksanakan proses kehidupan. Bagi kelompok tertentu, telah memanfaatkan mereka yang terasing untuk sebuah kepentingan yang bersifat sementara. Dalam konteks tertentu, keterasingan manusia ini akan menguatkan sikap pemberontakan kepada mereka yang berkuasai dan menguasai kawasan pembentukan keterasingan.

Konflik keterasingan individu dapat dilihat dari lingkungan pekerja, baik di lingkungan TNI-POLRI, PNS dan mereka yang bekerja di luar instansi pemerintah. Hal ini menjadi fenomena penting pada masa sebelum pemerintahan Gus Dur. Sebelum pemerintahan Gus Dur para pekerja telah bekerja dengan tekun, namun tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat dari keterasingan ini, maka telah menimbulkan kecurangan di tempat bekerja, korupsi, kolusi dan nepotisme untuk menempatkan para saudara dan kolega berada pada tempat yang strategis. Selain ekses kecurangan, kekerasan dan konflik kepentingan yang keras hanya karena untuk keluar dari keterasingan diri di tengah perkerjaan.

Di era gerakan Gus Dur digambarkan, bahwa keterasingan tidak hanya terkait dengan rupa pekerjaan sebagai aparatur Negara, TNI maupun Sipil. Keterasingan dialami sebagian warga Negara dalam konteks sebagai warga Negara yang tidak sepenuhnya merasakan diri sebagai bagian dari warga Negara. Misalnya, jalan terbatas bagi orang Cina di negeri ini. Pada masa ini orang cina selalu mengalami kesalahan. Misalnya, diminta ganti nama, namun masih ditanyakan nama aslinya ketika mendaftarkan anak ke sekolah atau membuat paspor. Persoalan bagi masyarakat Cina karena keputusan politik, yang membedakan hak orang Cina dan hak pribumi. Karenanya, jika ada cina masuk AKABRI, harus lulus jadi perwira dan menerima kenyataan karena tidak dapat naik pangkat lebih dari kolonel. Jadi, konflik keterasingan di Indonesia tidak hanya dirasakan para pekerja yang terdiri dari masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai pribumi, namun juga dirasakan para pekerja yang dikenal sebagai generasi masyarakat Cina. Fenomena ini yang membuat masyarakat yang terasing mengadukan permasalahannya kepada Gus Dur.

Sebelum menjadi presiden Gus Dur berperan sebagai konselor lintas budaya yang menjawab persoalan subjek dampingan yang terasing dalam hidupnya, baik terasing di tengah lingkungan pekerjaan maupun terasing berperan sebagai

warga Negara Indonesia. Hasil dari pendampingan Gus Dur sebelum menjadi presiden RI, telah menguatkan sikap kebijakan Gus Dur untuk membebaskan individu dari keterasingan diri di lingkungan kerja maupun di tengah kehidupan sebagai warga Negara Indonesia. Sikap kebijakan ini, berupa menaikkan gaji TNI POLRI dan PNS hingga 100%. Dalam konteks kewarganegaraan, Gus Dur telah menguatkan peran dan hak hak kewarganegaraan siapa pun yang sudah menjadi warga Negara Indonesia (Wahid:1984). Konsep ini diistilahkan oleh Gus Dur dengan sebuah ungkapan, “menyatukan dengan orang Cina». Konseling lintas budaya Gus Dur, telah menguatkan subjek dampingan yang terasing menjadi merasakan atau menemukan jalan keluar atau harapan memperjuangkan hak hak sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Persoalan konseling yang sering dihadapi oleh konseli, adalah merasakan sebagai individu yang hidup terasing di tengah lingkungannya. Persoalan ini akan semakin membuat gelisah dan tertekan, ketika individu menghadapi persoalan dengan pihak yang lain di tengah masyarakat. Misalnya, masalah keterasingan individu di tengah keluarga, tetangga, dan masyarakat. Sehubungan dengan masalah ini, konseling lintas budaya Gus Dur memberikan arahan kepada subjek dampingan sesuai dengan prinsip nilai yang membentuk konseli. Misalnya, jika subjek dampingan dari mereka yang berlatar belakang agama Islam, maka ia menguatkan nilai agama dan bahaya kekerasan sebagai dasar pembebasan dan pencerahan kepada subjek dampingan.

Sedangkan, secara spesifik beberapa persoalan keberagamaan konseli dapat diidentifikasi menjadi beberapa problem berikut: *pertama*, problem konseli di tengah konflik keberagamaan disebabkan pada pemahaman terhadap makna agama yang dipahami secara parsial, agama sebagai kepentingan personal tokoh agama dan agama sebagai kepentingan keomunal antara umat beragama. Hal-hal yang dijadikan sebagai prinsip ajaran keberagamaan yang rawan dengan konflik, karena sumber ajaran dimanfaatkan oleh kuasa agama untuk membangun

kekuasaan bumi surga penguasa agama. Prinsip nilai-nilai yang hendak dibangun oleh penguasa agama ini, berupa nilai budaya feodalistik dan paternalistik. Karena adanya perebutan nilai ini, maka mereka yang berada pada nilai budaya yang terbentuk secara destruktif ini akan melakukan konflik atas nama agama untuk merebut sistem kekuasaan para penguasa agama.

Kedua, problem kepentingan komunal yang terbentuk melalui proses keberagamaan. Konflik kemunal ini, karena kepentingan komunal lebih awal membentuk nilai budaya subjek sebelum mengenal nilai yang lain. Konflik komunal ini bersumber dari sikap aktual kepentingan kelompok merespon perkembangan isu-isu yang secara langsung bersentuhan dengan konseli. *Ketiga*, problem konseli yang bersumber dari konflik kebangsaan. Misalnya, ada kelompok yang mengatasnamakan agama menyimpang dari prinsip agama kenabian, namun dampak dari kepentingan komunal ini, adalah konflik komunalitas yang berdampak pada individu korban kepentingan kelompok.

Keempat, konflik konseli yang memiliki persoalan pribadi karena korban kuasa masyarakat yang bertindak secara tidak manusiawi. Sumber konflik ini disebabkan alasan agama atau tradisi atau kebijakan pemimpin tentang sebuah perkara yang bertentangan dengan sikap personal yang sebenarnya dilakukan secara manusiawi. Misalnya, kasus kasus para selibritis, politisi, dan tokoh agama yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari sumber kebenaran tradisi dan masyarakat. Keterlibatan Gus Dur menjawab persoalan ini, selain secara personal konseli mengadukan ke Gus Dur, juga bentuk kepedulian Gus Dur melakukan pendekatan kepada konseli atau subjek dampingan. Problem individu yang terlihat biasa, namun sangat berpengaruh pada kondisi psikis individu, adalah model yang kelima, yaitu adanya konflik masyarakat di tengah relasi kuasa personal. Konflik ini didasarkan pada kehendak kuasa yang menghegemoni bahasa masyarakat. Sumber kebenaran hanya didasarkan pada kerangka berfikir mereka yang menduduki kursi kekuasaan (Wahid:1987). Problem konseling yang seperti

ini tidak bisa dianggap problem biasa, karena secara langsung akan berdampak pada aspek psikis individu dan masyarakat.

Sehubungan dengan kasus tersebut, keberadaan Gus Dur sebagai konselor telah mampu memberikan pendampingan dan penguatan mental konseli di tengah kuasa masyarakat. Sebagai seorang konselor, Gus Dur mampu meyakinkan konseli untuk memahami hak haknya di tengah kuasa masyarakat. Alasan yang menunjukkan keberhasilan pendampingan Gus Dur, adalah tidak sedikit persoalan dengan kreteria tersebut yang dapat diselesaikan bersama model pendampingan Gus Dur. Fenomena problem konseli seperti ini, banyak ditemukan melalui acara Open House bersama di kediaman Gus Dur. Model konseling lintas budaya melalui acara open house ini memudahkan Gus Dur membebaskan atau mencerahkan subjek di tengah kehidupan masyarakat. Secara metodologis, model pendekatan konseling lintas budaya Gus Dur didasarkan pada cara berikut: model pendampingan para nabi Pembebas dan model pribumisasi Islam Walisongo, positivistik, rasional-empirik, spiritual, kebudayaan, dan ekspresif. Metodologi ini memudahkan Gus Dur untuk mendapatkan informasi dan data nilai kebudayaan tentang konseli yang akan diintegrasikan dengan nilai kebudayaan masyarakat secara egaliter. Dengan demikian, adanya hegemoni kuasa masyarakat akan mendapatkan kritik dari Gus Dur.

Meskipun Gus Dur mendapatkan data dari konseli atau subjek dampungannya sendiri, namun bukan berarti menerima apa adanya. Dalam konteks pendampingan, Gus Dur juga berupaya membuka dan memahami sendiri problem konseli tanpa menunggu pengakuan konseli. Jika kita membaca bangunan teoritik pendampingan Gus Dur, maka model pendampingannya akan terlihat sangat rasional dan empiris. Adapun sistematika yang menjadi pijakan Gus Dur, berupa cara menghubungkan antara latar belakang konseli dengan konteks persoalan yang dihadapi Konseli, sehingga jawaban Gus Dur tidak mengandung uraian yang bertentangan. Hal ini terbaca dari konteks pemecahan masalah yang disampaikan Gus Dur secara

rasional. Ada beberapa yang belum dapat dipahami, namun akhirnya dapat dipahami secara rasional antara relasi teoritiknya dengan fakta yang disampaikan kepada konseli. Karenanya, sebelum seseorang membaca *Culture Healing Perspektif KH. Abdurrahman Wahid*, sebelumnya perlu membaca teori tentang *culture healing*.

C. Simpulan

Aktivitas Gus Dur dalam pendampingannya terhadap masyarakat baik di kalangan masyarakat muslim maupun non muslim sarat dengan nilai-nilai praktis dalam konsep konseling lintas budaya. Dengan demikian, pendampingan Gus Dur juga berperan sebagai sosok konselor yang memiliki kemampuan memahami latar belakang historis konseli. Sehubungan dengan praktik konseling ini, Gus Dur tidak memaksakan konseli (Rosjidan: 1995) harus memecahkan masalah dengan model prinsip dan system budaya Gus Dur, namun membuka kesadaran konseli dengan latar belakang sejarahnya sendiri. Jadi, sebagai subjek pendamping, Gus Dur mampu menempatkan subjek dampingan secara otonom dan bermartabat, bukan untuk menghegemoni dan menekankan model penyelesaian masalah dengan kekerasan. Konseling lintas budaya Gus Dur juga dapat digunakan untuk menjawab serangkaian tragedi kemanusiaan, anti-toleransi, anti-kemanusiaan, dan aksi teror (Roth: 2003). Aspek pembentuk konseling lintas budaya Gus Dur, berupa agama, psikologis, sosiologis, antropologis, politik, sosial, budaya, dan teknologi.

Sebagai seorang Ulama dan konselor lintas budaya, Gus Dur memahami konflik psikis dan kepribadian individu, karena adanya pengaruh paradigma individualistik dan dualisme-mekanistik. Paradigma individualistik dan dualisme-mekanistik ini yang akan melahirkan seperti digambarkan Capra (1997:3), yaitu bentuk krisis multidimensional, yang langsung menyentuh hal-hal berikut: kualitas lingkungan dan hubungan sosial,

ekonomi, teknologi, politik, krisis dimensi intelektual, moral, dan spiritual.

Paradigma individualistik dan dualisme-mekanistik juga mengakibatkan konflik psikis yang berbenturan dengan malapetaka dan imajinasi kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Roth, 2003: 21). Ambiguitas kerangka berfikir manusia modern yang mengaitkan antara kebebasan dan kejahatan ini, jika tidak terjawab dengan baik, maka akan melahirkan persoalan hidup yang terus menghantui psikologis manusia. Keberadaan pendekatan konseling lintas budaya Gus Dur ini dapat mengisi khazanah keilmuan bidang konseling Islam dan menambah penguatan peran pendampingan Ulama atau Kiai yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, D.J., Gingras, A.C, 1991, *Sensitizing Counselor and Educators to Multicultural Issues: an interactive approach*. Journal of Counseling and Development. 70: 91-93.
- Abdurrahman Wahid. "Masa Islam dalam kehidupan bernegara dan bangsa," dalam Muh. Sholeh Isre. ed. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- . "Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama," dalam Kacung Marijan. ed. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- . "Republik Bumi di Sorga" dalam *Prisma Pemikiran Gus Dur 1975–1984*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- . *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- . "Pribumisasi Islam", dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh. eds. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M, 1989
- . "Salahkah Bila Dipribumikan" dalam Muhammad Saleh Isre. ed. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- . *Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab: Sebuah Pergumulan Wacana dan Transformasi*. Jakarta, Fatma Press, 1989.
- . "Merelevansikan Bukannya Menghilangkan" dalam *Amanah*, Agustus 1987
- . "Agama Ideologi dan Pembangunan" dalam Muhammad Shaleh Isre. Ed. *Prisma, Pemikiran Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- . "Antara Asas Islam dan Asas Pancasila," dalam Zaini Shafari Al Raef dan Andri Taufik H., Masa

- Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa. dalam *Prisma* No. Ekstra. 1984;
- Carter, RT. 1991. *Cultural Values: a review of empirical research and implications for counseling*. *Journal of Counseling & Development*. 70: 164-173.
- Capra, Fritjof, 1997, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Penerjemah M. Thoyibi (dari judul *The Turning Point: Science, Society and The Rising Culture*, Bantam Book, New York), Benteng Budaya, Yogyakarta
- Cowburn, John, 2008, *Free Will, Predestination and Determinism*, Marquette University Press, Milwaukee-Wisconsin
- Corey, Gerald, 2004, *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Monterey, California : Brooks/Cole Publishing Company.
- Davenport, Donna., Yurich, John. 1991. *Multicultural Gender Issues*. *Journal of Counseling & Development*. 70 (1): 64-71.
- Elly. M. Setiadi. Dkk, 2007, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Griffin, David Ray & John Cobb Jr., 1976, *Process Theology: An Introductory Exposition*, The Westminster Press, Philadelphia
- Goode, William. 1991. *Sosiologi Keluarga (terjemahan oleh Lailahanum Hasyim)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hollingshead, A. R., & Redlich, F. C., 1972, *Social class and mental health*. New York: Wiley, 1958
- Jumarlin, 2002, *Dasar – Dasar Konseling Lintas Budaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kane, Robert, 2005, *A Contemporary Introduction to Free Will*, Oxford University Press, New York-Oxford
- Kneller, G.F, 1978, *Educational Anthropology*. New York: Robert. F. Krieger

- May Rollo, 2003, *The Art of Counseling*. New Jersey : Prentice Hall, Inc
- Matsumoto, D., 2008, *Pengantar Psikologi Lintas Budaya*. Yogyakarta : pustaka pelajar
- McRae, Mary., Johnson, Samuel. 1991. *Toward Training for Competence in Multicultural Counselor Education*. Journal of Counseling & development. 70 (1): 131-135.
- Menanti, Asih. 2005. *Konseling Indigenous*. Makalah disampaikan pada Konvensi Nasional ABKIN di Bandung 2005.
- Pink, Thomas, 2004, *Free Will: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, New York-Oxford
- Prayitno, 2005, *Konseling Pancawaskita*. Padang : FIP Universitas Negeri Padang
- Roth, John K., 2003, *Persoalan-persoalan Filsafat Agama (Kajian Pemikiran 9 Tokoh dalam Sejarah Filsafat dan Teologi)*, Penerjemah Ali Noer Zaman (dari judul asli *The Problems of the Contemporary Philosophy of Religion*, Harper and Row, 1974), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rosjidan. 1995. *Pengembangan Bimbingan dan Konseling dengan Budaya Nasional: rintisan*. Makalah disampaikan dalam Kongres VIII dan Konvensi nasional X IPBI di Surabaya.
- Suseno, Magnis, Franz. 1993. *Etika Jawa. Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Vontress, Clemmont. 2002. *Online Readings in Psychology and Culture (Unit 10, Chapter 1)*, (<http://www.wvu.edu/~culture>). Diakses tanggal 20 Mei 2007.
- Wells, Alan. 1970. *Social Institutions*. London: Heinemann.

